

ABSTRAK

NYONG UMAR.2024. Pengaruh Kebijakan Pengalokasian Anggaran dan Pengadaan Pemaketan Barang / Jasa Pemerintah terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Ternate, dibawah bimbingan Amran Husen dan Jufri Jacob.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai regulator pengadaan barang/jasa pemerintah telah membuka peluang besar kepada UMKM untuk dapat berkembang. Hal itu tercantum dalam amanat Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah untuk meningkatkan peran serta UMKM. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah terbukti memberikan sumbangan yang tidak sedikit terhadap PDB Indonesia. Belanja barang/jasa pemerintah terhadap produk UMKM sebesar 40 persen, sehingga peran UKM harus terus diupayakan sehingga pertumbuhannya terus meningkat. Salah satu upayanya adalah instansi pemerintah harus meningkatkan anggaran dan paket-paket kegiatan pengadaan barang/jasa untuk dilakukan pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaitan antara anggaran dan paket pengadaan terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Ternate. Dengan menggunakan data sekunder Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) PD Kota Ternate yang ditayangkan dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa(SIRUP) LKPP, dan data UMKM dari Dinas Koperasi UMKM Kota Ternate. Metode analisis data adalah analisis kuantitatif regresi berganda menggunakan Software SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggaran dan paket-paket pengaaan barang/jasa melalui mekanisme Tender berpengaruh positif, sementara jumlah anggaran dan paket-paket pengadaan barang/jasa melalui mekanisme Swakelola berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan UMKM.

Kata Kunci: Pengadaan, Tender,Swakelola, Anggaran, Paket, UMKM.

ABSTRACT

NYONG UMAR, 2024. The Influence of Budget Allocation Policy and Government Goods/Services Procurement Packaging on the Growth of UMKM (Micro, Small, and Medium Enterprises) in Kota Ternate. Supervised by Amran Husen and Jufri Jacob.

The Government Goods/Services Procurement Policy Agency (*LKPP*) as a regulator of government goods/services procurement has opened up great opportunities for *UMKM* to be able to develop. This is stated in the mandate of Presidential Regulation No. 16 of 2018, Presidential Regulation No. 12 of 2021 concerning Government Procurement of Goods/Services, that one of the objectives of Government Procurement of Goods/Services is to increase the role of *UMKM*. Micro, Small and Medium Enterprises have been proven to contribute significantly to Indonesia's GDP. Government spending on goods/services for *UMKM* products is 40 percent, so the role of *UMKM* must continue to be pursued so that their growth continues to increase. One of the efforts is that government agencies must increase the budget and packages of goods/services procurement activities to be carried out by *UMKM* actors. This study aims to determine the relationship between the budget and procurement packages and the growth of *UMKM* in Kota Ternate. By using secondary data from the General Procurement Plan (*SIRUP*) of Kota Ternate which is displayed in the General Procurement Plan System for Goods/Services (*SIRUP*) *LKPP*, and *UMKM* data from Kota Ternate Cooperative Service for *UMKM*. The data analysis method is quantitative multiple regression analysis using SPSS 25 Software. The results of the study indicate that the amount of budget and packages of procurement of goods/services through the tender mechanism have a positive effect, while the amount of budget and packages of procurement of goods/services through the *Swakelola* (Self-management) mechanism have a negative effect on the growth of *UMKM*.

Keywords: Procurement, Tender, Self-management, Budget, Package, *UMKM*.

